



RAHMAN NURDIN SALEH

Arah Politik Gerakan Islam pada Dua Zaman: Studi Komparatif antara *Ikhwanul Muslimin* di Mesir dan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia

ABSTRAKSI: Artikel ini adalah studi komparatif tentang dua gerakan Islam di tempat dan zaman yang berlainan. Masalah utamanya adalah bagaimana arah politik gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, 1928-1949, dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia, 1998-2009. Metode yang digunakan adalah metode historis yang dalam pengumpulan data-datanya, penulis melakukan teknik studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Ikhwanul Muslimin di Mesir merupakan salah satu gerakan politik yang besar di dunia Islam, termasuk pengaruhnya di Indonesia. Kemunculan PKS di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Ikhwanul Muslimin di Mesir, terutama dalam hal pemikiran politik. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Ikhwanul Muslimin di Mesir, tahun 1928-1949, dengan PKS di Indonesia, tahun 1998-2009, adalah gerakan yang sama atau serupa. Keduanya ternyata memiliki arah gerakan politik yang berbeda. Jika Ikhwanul Muslimin di Mesir menjadikan dasar-dasar pemikiran ideologisnya sebagai acuan gerakan, maka PKS di Indonesia mencoba untuk merekonstruksi pemikiran ideologis yang diadopsi dari Ikhwanul Muslimin di Mesir agar sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

KATA KUNCI: Ikhwanul Muslimin, PKS, pemikiran politik, nasionalisme, demokrasi, negara Islam, negara kebangsaan, Mesir, Indonesia, serta persamaan dan perbedaan.

ABSTRACT: "Political Direction of Islamic Movement in Two Periods: A Comparative Study between Muslim Brotherhood in Egypt with Prosperous Justice Party in Indonesia". This article is a comparative study of two Islamic movements that different in places as well as periods. The main issue is how the political direction of Egypt's Muslim Brotherhood, 1928-1949, movement with Prosperous Justice Party in Indonesia, 1998-2009. The method used is the historical method with its data collection, author conducted a literature study technique. Based on the results of this study can be explained that the Muslim Brotherhood in Egypt is one of the major movement in the Islamic world and its influences to Indonesia. The emergence of Prosperous Justice Party in Indonesia can't be separated from the influence of the Egypt's Muslim Brotherhood, especially in terms of political thought. Nevertheless, it can't be concluded that the Muslim Brotherhood in Egypt, 1928-1949, and Prosperous Justice Party in Indonesia, 1998-2009, are a movement with the same or similar ideas. Both movements remain have the differences. If the Muslim Brotherhood of Egypt make the ideological premises as a reference of movement, the Prosperous Justice Party in Indonesia trying to reconstruct the ideological thinking of the Egypt's Muslim Brotherhood in order to be adopted in accordance with the circumstances in Indonesia.

KEY WORD: Muslim Brotherhood, Prosperous Justice Party, political thought, nationalism, democracy, Islamic state, nation-state, Egypt, Indonesia, and similarities and differences.

About the Author: Rahman Nurdin Saleh, S.Pd. adalah Alumni Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia, lulus tahun 2015. Untuk kepentingan akademik, penulis dapat dihubungi dengan alamat emel: rahman_n.saleh@gmail.com

How to cite this article? Nurdin Saleh, Rahman. (2016). "Arah Politik Gerakan Islam pada Dua Zaman: Studi Komparatif antara Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia" in *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Vol.1(1), February, pp.103-120. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, ISSN 2443-1776.

Chronicle of the article: Accepted (November 14, 2015); Revised (January 3, 2016); and Published (5 February 2016).

PENDAHULUAN

Pada abad ke-19, dunia Islam mengalami kemunduran yang amat pesat. Banyak wilayah kaum Muslimin yang menjadi jajahan Barat. Turki Utsmani, yang merupakan representasi kekhalifahan Islam saat itu, pun mengalami hal yang sama. Turki Utsmani banyak kehilangan wilayah kekuasaannya, terutama di daerah Balkan, hingga selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1924, Turki Utsmani dihapuskan oleh Mustafa Kemal Pasha. Penghapusan kekhalifahan Turki Utsmani ini merupakan pukulan telak bagi dunia Islam. Tetapi hal tersebut bukan berarti usaha-usaha menyatukan kembali kaum Muslimin terhenti sampai di situ.

Kaum Muslimin berpikir untuk merespon kemunduran tersebut, sehingga banyak melahirkan, apa yang disebut oleh Will Durant dan Ariel Durant, sebagai “sosok-sosok kreatif yang mampu mengembangkan energi positif dan potensi inti” (dalam Ash-Shalabi, 2011:x). Sosok-sosok kreatif tersebut kemudian membentuk berbagai macam organisasi atau gerakan Islam. Salah satu dari sekian banyak gerakan Islam yang lahir pada abad ke-20 adalah *Ikhwanul Muslimin* di Mesir.

Ikhwanul Muslimin adalah salah satu gerakan Islam yang paling berpengaruh di dunia. Pengaruhnya tidak sebatas di Mesir, tetapi menyebar ke negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk Indonesia. Di Indonesia, ada satu gerakan yang disebut-sebut sebagai kepanjangan tangan dari *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, yaitu Gerakan *Tarbiyah*, yang kemudian telah menjelma menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Meskipun PKS di Indonesia disebut-sebut merupakan kepanjangan tangan dari *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, tetapi penulis meyakini bahwa antara *Ikhwanul Muslimin* di Mesir dengan PKS di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan, terutama dalam hal pemikiran. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas perbedaan antara *Ikhwanul Muslimin* di Mesir dengan PKS di Indonesia berdasarkan aspek-aspek pemikiran tertentu. Dari perbandingan

ini kemudian bisa dianalisis, kemanakah arah dan tujuan yang sesungguhnya dari kedua gerakan Islam tersebut.

Mengenai batasan rentang waktu, penulis memilih dua rentang zaman yang berbeda dalam studi komparatif terhadap kedua organisasi ini. Untuk *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, penulis memfokuskan kajiannya dari tahun 1928, ketika gerakan ini berdiri, sampai tahun 1949, ketika tokoh utama gerakan ini, yaitu *Syeikh* Hasan al-Banna, wafat. Hasan al-Banna merupakan tokoh utama *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, sekaligus pencetus dasar-dasar pemikiran *Ikhwanul Muslimin*. Sedangkan untuk PKS di Indonesia, penulis sengaja memfokuskan kajiannya dari tahun 1998, ketika didirikannya Partai Keadilan sebagai cikal-bakal PKS oleh para aktivis Islam, hingga tahun 2009, ketika partai ini menjadi salah satu partai yang bersinar di panggung politik Indonesia.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMIKIRAN POLITIK

Pertama, Pemikiran tentang Nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat kebangsaan dan perasaan kebangsaan, yaitu semangat atau perasaan cinta terhadap bangsa dan Tanah Air melebihi apapun juga.¹ Dengan kata lain, nasionalisme adalah faham yang menempatkan kecintaan terhadap Tanah Air, bangsa, serta negara di atas segalanya.

Ikhwanul Muslimin di Mesir, pada tahun 1928-1949, berkembang ketika gaung nasionalisme mencapai puncaknya. Pada saat itu negara-negara di Asia dan Afrika sedang mengalami kebangkitan nasionalisme. Bentuk nasionalisme tersebut dapat kita lihat dari perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk merdeka dari belenggu imperialisme negara-negara Barat. Dalam situasi seperti itu,

¹Tentang definisi “nasionalisme” ini lihat, misalnya, artikel berjudul “Pengertian Nasionalisme”. Tersedia secara online di: <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-nasionalisme-para-ahli-definisi.html> [diakses di Bandung, Indonesia: 22 April 2015].

Ikhwanul Muslimin di Mesir, sebagai gerakan Islam, tentunya memiliki pandangan tersendiri mengenai nasionalisme. *Ikhwanul Muslimin* di Mesir tidak serta-merta menelan mentah-mentah konsep nasionalisme yang berkembang kala itu.

Hasan al-Banna, sebagai pendiri sekaligus pemimpin *Ikhwanul Muslimin* di Mesir dari tahun 1928-1949, telah menjelaskan bagaimana sikap *Ikhwanul Muslimin* terhadap paham nasionalisme. Hasan al-Banna (2012a) menyatakan secara panjang-lebar tentang “nasionalisme”, sebagai berikut:

Pertama, jika yang dimaksud dengan “nasionalisme” oleh para penyerunya adalah cinta Tanah Air, keberpihakan padanya, dan kerinduan yang terus menggebu terhadapnya, maka hal itu sebenarnya sudah tertanam dalam fitrah manusia. Lebih dari itu, Islam juga menganjurkan yang demikian.

Kedua, jika yang mereka maksudkan dengan “nasionalisme” adalah keharusan membebaskan Tanah Air dari cengkraman imperialisme, menanamkan makna kehormatan, dan kebebasan dalam jiwa putera-putera bangsa, maka kami pun sepakat tentang itu; bahkan Islam telah menegaskan perintah itu dengan setegas-tegasnya.

Ketiga, jika yang mereka maksudkan dengan “nasionalisme” adalah memperkuat ikatan kekeluargaan antara anggota masyarakat atau warga negara, serta menunjukkan kepada mereka cara-cara memanfaatkan ikatan itu untuk mencapai kepentingan bersama, maka disini pun kami sepakat dengan mereka; bahkan Islam menganggap itu sebagai kewajiban.

Keempat, jika yang mereka maksudkan dengan “nasionalisme” adalah membebaskan negeri-negeri lain dan menguasai dunia, maka itu pun telah diwajibkan oleh Islam. Islam bahkan mengarahkan para pasukan pembebas untuk melakukan pembebasan yang paling berbekas.

Kelima, jika yang mereka maksudkan dengan “nasionalisme” itu adalah memilah umat menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan dan berseteru satu sama lain, mengikuti sistem nilai buatan manusia yang diformulasi sedemikian rupa untuk memenuhi ambisi pribadi, maka itu pasti nasionalisme palsu yang tidak akan membawa secuil pun kebaikan, baik bagi penyerunya maupun bagi masyarakat luas.

Keenam, yang membedakan kami dengan

mereka adalah bahwa batasan nasionalisme bagi kami ditentukan oleh *aqidah*, sementara pada mereka batasan paham itu ditentukan oleh teritorial wilayah negara dan batas-batas geografis. Bagi kami, setiap jengkal tanah di bumi ini, dimana di atasnya ada seorang Muslim yang mengucapkan *laa ilaaha illallah*, maka itulah Tanah Air kami. Kami wajib menghormati kemuliaannya dan siap berjuang dengan tulus demi kebajikannya. Semua Muslim (dimana pun mereka berada) adalah saudara dan keluarga kami. Kami turut merasakan apa yang mereka rasakan dan memikirkan kepentingan-kepentingan mereka. Sebaliknya, bagi kaum nasionalis (fanatik), semua orang yang ada di luar batas tanah tumpah darahnya sama sekali tidak dipedulikan. Mereka hanya mengurus semua kepentingan yang terkait langsung dengan apa yang ada di dalam batas wilayahnya.

Ketujuh, akhirnya, kaum nasionalis hanya berpikir untuk membebaskan negerinya. Dan bila kemudian mereka membangun negeri mereka, mereka hanya memperhatikan aspek-aspek fisik, seperti yang kini terjadi di daratan Eropa. Sebaliknya, kami percaya bahwa di leher setiap Muslim tergantung amanah besar untuk mengorbankan seluruh jiwa dan raga serta hartanya demi membimbing manusia menuju cahaya Islam. Setiap Muslim harus mengangkat bendera Islam setinggi-tingginya di setiap belahan bumi; bukan untuk mendapatkan harta, popularitas, dan kekuasaan, atau menjajah bangsa lain, tapi semata-mata untuk memperoleh *ridha* Allah dan memakmurkan dunia dengan bimbingan agamanya (al-Banna, 2012a:38-40).

Dari pernyataan Hasan al-Banna tersebut kita bisa melihat dengan jelas bagaimana *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, dari tahun 1928-1949, dalam menyikapi nasionalisme. Bagi *Ikhwanul Muslimin*, nasionalisme yang mereka anut adalah nasionalisme yang sejalan dengan ajaran Islam, bukan berlandaskan pada perasaan naluri dan hasil pemikiran akal semata. Nasionalisme ini ditujukan untuk kebangkitan, khususnya bagi kebangkitan Islam. *Ikhwanul Muslimin* di Mesir sangat merindukan kebangkitan Islam seperti dahulu (al-Banna, 2012a).

Ikhwanul Muslimin di Mesir tidak sepakat dengan pandangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud “saudara” adalah mereka

yang hidup bersama dalam satu negara, yang memiliki batas-batas teritorial tertentu. Pandangan seperti ini umumnya dianut oleh kaum nasionalis sekuler. Sebaliknya, *Ikhwanul Muslimin* di Mesir justru menganggap bahwa setiap Muslim dimana pun mereka berada (tanpa melihat batas-batas geografis) adalah saudara (al-Banna, 2012a).

Oleh karena itu, *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, dari tahun 1928-1949, memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kaum Muslimin. Sebagai contoh, ketika PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memutuskan untuk membentuk negara Yahudi-Israel di Palestina, maka Hasan al-Banna menyerukan *jihad* dan ikut berpartisipasi menentang pembentukan negara tersebut (Handayani, 2011:57). Hasan al-Banna juga memerintahkan cabang-cabang *Ikhwanul Muslimin* di seluruh dunia untuk melakukan persiapan *jihad* ke Palestina (Mitchell, 2005:78).

Sementara itu, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia, meskipun berkembang dalam kurun waktu dan kondisi yang berbeda, tetapi partai ini tetap memiliki pandangan tersendiri tentang nasionalisme. Pandangan PKS di Indonesia tentang nasionalisme menarik untuk dikaji, mengingat PKS ini merupakan sebuah gerakan Islam yang menjadikan Islam sebagai asasnya.

Salah satu deklarator PKS di Indonesia, yaitu KH (Kyai Haji) Hilmi Aminuddin, menyatakan bahwa nasionalisme atau kebangsaan itu adalah suatu hal yang *fitri*. Karena cinta kepada bangsa dan kepada Tanah Air itu pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Jadi, kecintaan kepada Tanah Air dan kepada bangsa itu adalah *fitriah*. Atas dasar itu maka doktrin-doktrin tentang kecintaan kepada Tanah Air dan kepada bangsa ditanamkan pada masa *tamhidiyah*, atau masa kader pemula, bagi PKS di Indonesia.²

²Lihat, misalnya, berita "PKS: Inilah Wawasan Nasionalisme dan Kebangsaan Kami". Tersedia secara online di: <http://www.al-intima.com/tauji-hilmi-aminuddin/pks-inilah-wawasan-nasionalisme-dan-kebangsaan-kami> [diakses di Bandung, Indonesia: 20 Mei 2015].

Walaupun begitu, KH Hilmi Aminuddin tidak menginginkan nasionalisme dan kebangsaan yang super, dalam pengertian yang meremehkan, mendiskreditkan, dan merendahkan bangsa lain, atau menyepelekan negeri-negeri lain. Karena semangat kebersamaan dan kerjasama dalam kehidupan nasionalisme dan kebangsaan ini dikembangkan secara lebih luas dalam konteks semangat kebersamaan dan semangat kerjasama dalam kehidupan kemanusiaan secara global dan internasional (*ibid* catatan kaki 2).

Sementara itu, mantan Presiden PKS di Indonesia, Luthfi Hasan Ishaq, menegaskan bahwa sejak dulu PKS adalah partai nasionalis, meskipun menggunakan Islam sebagai asas partai. Menurutnya, nasionalisme adalah bagian dari Islam, sehingga kalau PKS di Indonesia menggunakan asas Islam sebagai identitas partai, bukan berarti tidak nasionalis. Orang Islam otomatis juga nasionalis, karena cinta Tanah Air dan cinta bangsa adalah bagian dari ajaran Islam.³

Sikap dan dukungan PKS di Indonesia terhadap nasionalisme juga ditegaskan oleh seorang kader PKS, Abdul Kharis Almasyhari. Dikutip dari website resmi PKS Jawa Timur, Abdul Kharis Almasyhari mengemukakan sebagai berikut:

Jangan pernah mengaku nasionalis, jika belum benar-benar memahami isi dan makna Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Keempatnya dikenal dengan sebutan Empat Pilar Kebangsaan.

Pemuda itu harus mengambil bagian terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Maka dari itu, jangan mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan separatisme yang ada.⁴

³Lihat juga, misalnya, berita "Nasionalisme Bagian dari Islam?". Tersedia secara online di: http://nasional.kompas.com/read/2010/06/22/17043684/PKS.Nasionalisme.Bagian.dari.Islam?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news [diakses di Bandung, Indonesia: 25 April 2015].

⁴Lihat berita "Jangan Mengaku Nasionalis Sebelum Pahami Empat Pilar Kebangsaan". Tersedia secara online di: <http://pksjatim.org/2015/03/jangan-mengaku-nasionalis-sebelum-pahami-empat-pilar-kebangsaan/> [diakses di Bandung, Indonesia: 22 April 2015].

Selain pernyataan beberapa tokoh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia, sikap dan dukungan PKS terhadap nasionalisme juga dapat dilihat dari visi-misi partai, tujuan partai, dan juga program kerja partai. Dalam AD-ART (Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga) PKS, pasal 5, dijelaskan bahwa tujuan partai adalah: (1) terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) terwujudnya masyarakat *madani* yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah *Subhanahu Wa-Ta'ala* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (MPP, 2008:590).

Nasionalisme PKS di Indonesia, dengan demikian, mengakomodir nilai-nilai Islam dalam visi, misi, dan tujuan partai tersebut demi terwujudnya masyarakat *madani* yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dicitakan oleh Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, dengan menanamkan objektifikasi nilai-nilai Islam (Ihsan, 2009:107).

Dari beberapa fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa PKS di Indonesia sangat mendukung gagasan nasionalisme. Bahkan, prinsip nasionalisme PKS di Indonesia dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan prinsip nasionalisme pada umumnya. Hanya saja, nasionalisme PKS di Indonesia bukan nasionalisme sempit yang merendahkan atau berambisi menguasai bangsa lain.

Wujud nyata nasionalisme PKS di Indonesia yang paling terlihat adalah keinginannya membangun masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nasionalisme bagi PKS di Indonesia bukan hanya untuk mempertahankan wilayah teritorial saja, tetapi juga melaksanakan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika dibandingkan mengenai dua organisasi

Islam tersebut di atas, maka akan didapat persamaan dan perbedaan sekaligus tentang sikap dan pandangan terhadap “nasionalisme” antara *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, 1928-1949, dengan PKS di Indonesia, 1998-2009. Persamaannya dapat kita lihat bahwa keduanya sama-sama mendukung gagasan nasionalisme. Tetapi, perbedaan yang sangat mencolok terletak pada sikap terhadap penggunaan sistem-sistem nilai buatan manusia dan tujuan dari nasionalisme itu sendiri.

Ikhwanul Muslimin di Mesir, 1928-1949, menyebutkan bahwa nasionalisme yang menyuruh mengikuti sistem nilai buatan manusia sebagai nasionalisme palsu, yang tidak akan memberikan manfaat, baik bagi para penyerunya maupun bagi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan nasionalisme, bagi *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, harus dibatasi oleh *aqidah*. Maka *Ikhwanul Muslimin* di Mesir tidak dapat mentolerir penggunaan sistem-sistem nilai buatan manusia dalam kehidupan bernegara. Sistem-sistem nilai yang harus diikuti adalah sistem-sistem nilai yang berasal dari Islam, yang berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* (al-Banna, 2012b).

Sementara itu, PKS di Indonesia, tahun 1998-2009, justru terlihat lebih akomodatif dan kooperatif dengan sistem-sistem nilai yang ada di Indonesia, yaitu UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 dan Pancasila, yang merupakan buatan manusia. Program kerja dan pembangunan yang dilakukan oleh PKS di Indonesia tidak lepas dari koridor sistem tersebut. Hal ini dapat dipahami, karena PKS merupakan partai resmi di Indonesia. Sebagai partai, maka mau tak mau, PKS harus taat kepada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Dan sebagai partai yang mengikuti sistem PEMILU (Pemilihan Umum), maka PKS di Indonesia pun harus melakukan strategi politik yang baik, yang sesuai dengan keinginan masyarakat agar mendapat dukungan dan suara yang banyak (Machmudi, 2006).

Selanjutnya mengenai tujuan nasionalisme, *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, 1928-1949, memandang bahwa nasionalisme itu

ditujukan untuk kebangkitan Islam, persatuan dunia Islam, mengangkat bendera untuk menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia hingga memakmurkan dunia dengan Islam. Nasionalisme juga bukan digunakan untuk memecah-belah kaum Muslimin, sehingga mereka sibuk dengan urusannya masing-masing dan tidak peduli dengan urusan saudaranya di negeri lain (al-Banna, 2012b).

Nasionalisme bagi PKS adalah memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegahnya dari gerakan seperatisme yang mengarah kepada desintegrasi bangsa, serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (Furkon, 2004). Tidak pernah terlihat secara nyata dalam aktivitas politik PKS di Indonesia, yang menyebutkan tujuan-tujuan dari nasionalisme, seperti yang disebutkan oleh *Ikhwanul Muslimin* di Mesir yang sangat luas itu. Didalam kalangan internal PKS di Indonesia sendiri, mungkin saja para kadernya berpikir idealis seperti *Ikhwanul Muslimin* di Mesir; dan mencita-citakan hal yang sama, seperti yang dicita-citakan oleh *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Tetapi yang jelas, terlihat di hadapan publik, bahwa aktivitas politik PKS di Indonesia dalam memaknai nasionalisme, terlihat sejalan dengan pandangan nasionalisme pada umumnya (Furkon, 2004).

Kedua, Pemikiran tentang Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan, yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan, yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi – baik secara langsung atau melalui perwakilan – dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.⁵

Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi pada intinya adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan

kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut (*ibid* catatan kaki 5).

Ikhwanul Muslimin di Mesir, tahun 1928-1949, memiliki pemikiran yang unik tentang demokrasi. Pada dasarnya, *Ikhwanul Muslimin* di Mesir sepakat dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemerintahan. *Ikhwanul Muslimin* di Mesir mengakui sepenuhnya bahwa rakyat adalah sumber semua kedaulatan, dimana tidak dibenarkan bagi seseorang, sebuah partai, *jamaah*, atau kelompok apa pun untuk mengklaim bahwa dirinya lebih berhak atas kedaulatan daripada yang lain, atau terus berusaha meraihnya, kecuali perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat yang bebas dan benar (al-Ghazali, 2001:223).

Meskipun demikian, *Ikhwanul Muslimin* di Mesir dengan tegas menolak penerapan hukum-hukum, aturan-aturan, atau nilai-nilai buatan manusia, karena itu menyalahi aturan Islam. *Ikhwanul Muslimin* di Mesir berpandangan bahwa aturan dan hukum yang harus diterapkan dalam sebuah negara, tidak lain dan tidak bukan, adalah aturan dan hukum-hukum Islam. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Hasan al-Banna (2012b), yang menyatakan bahwa “Islam adalah *aqidah* dan *ibadah*, negara dan kewarganegaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan material, peradaban dan perundang-undangan” (al-Banna, 2012b:67).

Ikhwanul Muslimin di Mesir meyakini jika umat berpegang teguh kepada Islam, termasuk dalam bernegara, maka umat tidak akan tersesat selama-lamanya. Oleh karena itu, sistem yang membawa umat Islam ini harus bersumber dari sumber yang jernih, yaitu *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* (Syamakh, 2011:16). Hal ini tentunya bertolak belakang dengan salah satu beberapa prinsip demokrasi yang diilhami dari sekularisme. Dalam demokrasi *a la* sekularisme, keputusan dan pembuatan hukum yang akan diterapkan di suatu negara adalah menjadi hak manusia. Tuhan ataupun

⁵Lihat, misalnya, artikel berjudul “Demokrasi”. Tersedia secara online di: <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> [diakses di Bandung, Indonesia: 26 April 2015].

agama tidak memiliki hak dalam penentuan hukum, kecuali apabila memang mayoritas rakyat yang menginginkannya (Muhtadi, 2012).

Dalam Islam, halal-haram ditentukan oleh Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*) yang tertuang dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*. Sementara dalam demokrasi yang sekular, halal-haram ditentukan oleh manusia berdasarkan suara mayoritas. Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar antara demokrasi dan Islam. Maka dari itu sering ditemukan kebijakan-kebijakan yang lahir dari proses demokrasi, bertentangan dengan *syariat* Islam. *Ikhwanul Muslimin* di Mesir justru hadir untuk mengubah kebijakan-kebijakan tersebut agar sesuai dengan *syariat* Islam. Tetapi, *Ikhwanul Muslimin* di Mesir melakukan hal tersebut dengan cara-cara demokratis, seperti menyurati dan menasehati penguasa (Syamakh, 2011).

Ikhwanul Muslimin di Mesir menjadikan sistem demokrasi sebagai alat atau kendaraan untuk mewujudkan cita-citanya. Hal ini sangat terkait dengan pola pikir Hasan al-Banna sebagai pendiri *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, yang lebih bersifat fleksibel dan moderat terhadap perkembangan zaman dan tidak menafikan secara total segala sesuatu yang berasal dari Barat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti demokrasi. Dengan orientasi ideologi yang gradualis-adaptasionis, *Ikhwanul Muslimin* menjadikan kondisi perpolitikan internal Mesir berperan dalam memberikan kontribusinya, baik membangun ideologi maupun kerangka berpikirnya tentang demokrasi (al-Banna, 2012b).

Sistem pemerintahan dan orientasi partai-partai di Mesir yang lebih cenderung ke arah sekularisme negara, menjadi tantangan bagi *Ikhwanul Muslimin* untuk terjun dan melakukan pertarungan dengan partai-partai tersebut dan bersentuhan langsung dengan sistem demokrasi (Krismono, 2009:238-239). Disini dapat disimpulkan bahwa *Ikhwanul Muslimin* di Mesir menjadikan demokrasi sebagai alat atau jalan untuk mewujudkan cita-citanya melawan segala bentuk arus sekularisme

dan menerapkan *syariat* Islam didalam negara.

Selanjutnya, pandangan mengenai partai politik, dimana keberadaan partai politik adalah sangat penting dalam sistem demokrasi. Prinsipnya adalah bahwa dalam suatu organisasi, berbagai pihak yang sesungguhnya beragam dapat dikonsolidasikan dalam satu *front*. Prinsip inilah yang menjadi dasar pendapat mengapa partai politik memiliki peran penting dalam proses dinamika pelebagaan demokrasi. Proses pelebagaan demokrasi akan sangat ditentukan oleh pelebagaan organisasi partai politik, sebagai bagian dari sistem demokrasi itu sendiri (Rahmawati, 2013). Jadi, bisa dikatakan bahwa negara yang demokratis dicirikan oleh adanya lebih dari satu partai politik dalam negara tersebut.

Mengenai masalah kepartaian dalam sistem demokrasi, *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, 1928-1949, memiliki pandangan tersendiri. Hasan al-Banna menyatakan bahwa sistem kepartaian memiliki dampak buruk terhadap kehidupan bernegara, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

Ikhwan juga berkeyakinan bahwa kepartaian ini telah merusak semua keindahan tatanan kehidupan, memberangus *kemaslabatan*, merusak akhlak, dan memporak-porandakan kesatuan umat. Pada kehidupan secara khusus atau umum, kepartaian hanya melahirkan dampak buruk (dalam al-Ghazali, 2001:215).

Hasan al-Banna berpendapat demikian setelah beliau memperhatikan aktivitas partai politik di Mesir. Beliau menyebutkan bahwa partai politik sangat berambisi untuk merebut kepemimpinan negara, memenangkan isu kampanye, persaingan dalam cara dan tujuan, baik itu cara benar atau salah, dan mencela lawan-lawan politik yang menghalangi tercapainya tujuan itu (al-Banna, 2012b).

Demikian halnya dengan koalisi partai, yang seolah-olah menunjukkan persatuan di hadapan publik. Hasan Al-Banna dengan tegas menolak koalisi antarpolisi tersebut, dengan menyatakan lebih lanjut:

Ikhwanul Muslimin meyakini tidak bergunanya praktek koalisi antarpantai, dan meyakini bahwa itu hanya penenang, bukan penyembuh, karena betapa cepatnya orang-orang yang berkoalisi itu bubar, lalu kembali bertikai, bahkan lebih seru daripada sebelum berkoalisi. Obat yang paling mujarab adalah ketika partai-partai ini dilenyapkan secara sukarela, tugas mereka telah selesai dan usai pula kondisi yang dahulu melahirkannya (dalam al-Ghazali, 2001:216).

Di sisi lain, Hasan al-Banna justru memuji apa yang dinamakannya sebagai sistem politik *wihdah* (kesatuan tanpa kepartaian), dengan menyatakannya sebagai berikut:

Kita telah menerapkan sistem politik *wihdah* dua kali. Setiap kali dari dua periode itu selalu menampakkan kecemerlangan dalam sejarah kebangkitan. Periode pertama adalah “fajar kebangkitan”, yakni tatkala bangsa ini muncul dari dalam *shaf* yang satu dan bersatu-padu menyerukan dan menuntut haknya di tengah kebuasan para pemberangus dan penjajah [...].

Yang kedua tatkala pembentukan “front nasional”, yang mengajak kita menapaki langkah, kendati pendek, namun tidak bisa dipungkiri langkah itu mengajak ke depan (al-Banna, 2012b:79).

Tampaknya, sistem politik *wihdah* inilah yang dikehendaki oleh *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, dari tahun 1928-1949. *Ikhwanul Muslimin* di Mesir berpendapat bahwa sistem politik *wihdah* akan mengajak umat pada persatuan dan membawanya menuju kebangkitan. Hal ini bertolak belakang dengan sistem demokrasi yang menganggap bahwa pembentukan partai-partai politik adalah salah satu wujud masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, sekaligus menjadi kendaraan politik untuk mewujudkan aspirasi tersebut dalam rangka membangun negeri (Rahmawati, 2013).

Sementara itu, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia memiliki pandangan terhadap demokrasi yang hampir serupa dengan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, 1928-1949. PKS di Indonesia mendukung gagasan demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemerintahan, baik itu terjun langsung dalam

pemerintahan maupun melakukan pengawasan dan kritik terhadap pemerintah, bebas berpikir, berekspresi, bertindak, dan memilih jalan hidup. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Presiden PKS pada tahun 2013, Anis Matta, dimana beliau mengemukakan bahwa:

Semua individu dalam masyarakat demokrasi sama dengan individu lain. Semua sama-sama bebas berpikir, berekspresi, bertindak, dan memilih jalan hidup. Tidak boleh ada rasa takut, ada tekanan, terutama dari militer. Kebebasan hanya dibatasi oleh kebebasan yang sama. Namun, kebebasan (dalam demokrasi) ini ada harganya.

Para pelaku dakwah memang bebas menjalankan dakwahnya. Tetapi pelaku kemungkaran juga bebas melakukan kemungkaran. Yang berlaku di sini bukan hukum benar-salah, tapi hukum legalitas. Sesuatu itu harus legal, walaupun salah. Dan sesuatu itu benar tapi tidak legal adalah salah.

Jadi tugas kita adalah bagaimana mempertemukan antara kebenaran dan legalitas. Bagaimana menjadikan sesuatu yang haram dalam pandangan agama, menjadi tidak legal dalam pandangan hukum positif, dan apa yang diperbolehkan oleh agama menjadi legal dalam hukum positif itu (dalam Kamseno, 2013).

Sementara itu salah satu deklarator PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia, Fahri Hamzah, juga mengemukakan pandangannya tentang demokrasi, sebagai berikut:

Demokrasi sejalan dengan ide modernisasi, yang menuntut adanya perubahan di segala bidang kehidupan. Tradisi Islam bukanlah warisan kaku, yang hanya mempertahankan corak klasiknya. Meski pada awalnya Islam tidak mengenal prinsip demokrasi, namun gagasan universal demokrasi sejalan dengan prinsip Islam [...] tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi (dalam Kamseno, 2013).

Selanjutnya, Mahfudz Siddiq memaparkan keterkaitan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dengan demokrasi di Indonesia, sebagai berikut:

Di sebagian kalangan, ketika Islam politik ini tampil selalu dipersepsi sebagai antitesa demokrasi atau sesuatu yang berbeda. Yang menarik justru dalam konteks Gerakan *Tarbiyah* dan PKS, kesadaran dan pemahaman yang

terbangun adalah demokrasi. Hal ini bisa menjadi jalan bagi perjuangan Islam dan prinsip-prinsip demokrasi ini sebagiannya adalah sejalan dengan nilai Islam.

Jadi, perspektif ini muncul sejak awal, PK(S) malah menunjukkan diri sebagai kekuatan unsur demokrasi. Tentu saja demokrasi yang memiliki warna, nilai, dan pemikiran Islam. Dalam praktik politiknya, kita harus berjuang meyakinkan bahwa Partai Keadilan adalah partai yang perspektif awalnya menganut demokrasi sebagai jalan perjuangan, dan dalam dirinya pun melekat nilai-nilai demokratis (dalam Machmudi, 2006:103).

Dari pandangan tokoh-tokoh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya PKS menerima demokrasi sebagai bagian dari cara mereka menyampaikan aspirasi. Sama persis dengan apa yang berada dalam benak kalangan sekuler, yang juga menyampaikan aspirasinya lewat demokrasi. Yang berbeda dari keduanya hanya pada tataran ide tentang apa yang diperjuangkan. PKS di Indonesia menyampaikan apa yang diinginkan melalui prosedur demokrasi yang sah dan konstitusional, seraya tetap menghargai keragaman dan multikulturalitas dalam masyarakat. Itulah mengapa PKS di Indonesia menerima demokrasi sebagai sarana perjuangan (Machmudi, 2006).

Selain itu, PKS di Indonesia juga menunjukkan dirinya sebagai partai Islam yang tidak alergi dengan perkembangan zaman. PKS di Indonesia ingin menunjukkan bahwa Islam bisa akomodatif dengan perkembangan zaman, termasuk dengan demokrasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi, bahwa:

[...] dulu, partai Islam dicitrakan anti-demokrasi, karena cenderung teokratik. Namun, ketika masuk dalam sistem demokrasi, PKS kemudian menjadi semakin moderat. Partai ini mampu mengawinkan Islam dan demokrasi” (dalam Bilal, 2012).

Dalam hal kedaulatan Allah dalam pembuatan hukum dan pemutus perkara yang digeser oleh kedaulatan rakyat, PKS (Partai

Keadilan Sejahtera) di Indonesia berpandangan bahwa sesungguhnya kedaulatan Allah yang terwujud dengan ditegakkannya *syariat* Islam, itu tidak mesti diterapkan secara mentah-mentah menjadi aturan atau hukum negara. Menurut PKS, perjuangan umat saat ini adalah perjuangan untuk menegakan nilai-nilai universal Islam dalam masyarakat dan bangsa Indonesia dalam rangka menebarkan rahmat bagi seluruh alam, dan menjadi guru bagi peradaban yang dilakukan, baik secara kultural maupun secara struktural (MPP, 2008:73).

Jadi, PKS di Indonesia tidak memperlakukan berlakunya kedaulatan rakyat dalam pembuatan hukum, tetapi mengusahakan tegaknya nilai-nilai universal Islam dalam pembuatan hukum tersebut. PKS menyebutkan ide-ide seperti pemberantasan korupsi, pemberantasan mafia peradilan, mengentaskan kemiskinan, membela nasib buruh, dan lain sebagainya merupakan contoh penerapan nilai-nilai universal Islam dalam hukum di Indonesia (MPP, 2008).

Para pendiri partai politik PKS di Indonesia ini adalah tokoh-tokoh yang menaruh hormat kepada Hasan al-Banna dan mengagumi cita-cita *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Tetapi dalam hal kepartaian, mereka berusaha menegaskan bahwa demokrasi, dimana partai politik adalah salah satu instrumen pentingnya, sejalan dengan nilai-nilai politik Islam. Waktu dan evolusi sejarah membuat mereka merasa bahwa partai politik adalah kebutuhan nyata (Haya, 2014:5).

Meskipun demikian, PKS memberikan kritik terhadap sistem multi-partai dan koalisi partai yang berlaku di Indonesia. PKS di Indonesia melihat bahwa sistem seperti ini sarat dengan kepentingan politik. Apa yang dinamakan dengan koalisi partai adalah semu, yang tampak hanyalah usaha untuk membesarkan partainya masing-masing. MPP (Majelis Pertimbangan Partai) PKS di Indonesia, selanjutnya, mengemukakan, sebagai berikut:

[...] tampak jelas bahwa sistem multi-partai di parlemen telah membuat ketidakseimbangan kekuatan di antara mereka menjadi mungkin.

Dengan kata lain, “koalisi” yang terjadi ini sangat rawan dan tidak permanen. Karenanya dapat diprediksi ketika citra pemerintah terpuruk, maka partai-partai politik pendukung pemerintah dapat lari tunggang-langgang meninggalkan “koalisi”, khawatir kecipratan citra terpuruk itu (MPP, 2008:93).

Menyadari hal itu, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) lantas memberikan solusi alternatif tentang sistem kepartaian untuk diberlakukan di Indonesia. Dalam konteks ini MPP (Majelis Pertimbangan Partai) PKS di Indonesia, kembali mengemukakan, sebagai berikut:

[...] sistem demokrasi Presidensial dengan jumlah partai sedikit, lebih menguntungkan dalam mendukung stabilitas politik nasional. Karena dengan sistem ini memungkinkan munculnya *ruling parties* yang lebih sederhana (namun dominan), sehingga koalisi yang relatif lebih permanen dapat terwujud. Penetapan batas ambang parpol peserta Pemilu atau sistem distrik dapat secara efektif menyederhanakan jumlah partai di parlemen.

Jadi, pilihan untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu adalah upaya untuk menumbuhkan pemerintahan yang stabil, efektif dan efisien, namun juga mengakomodasi kondisi spektrum pluralitas politik yang ada di Indonesia. Karenanya, memang eksperimentasi demokrasi seperti ini mesti dilakukan secara bertahap dan gradual (MPP, 2008:93-94).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia tidak dapat menafikan eksistensi partai dalam sistem demokrasi. Partai merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi. Tetapi masalah kepartaian ini harus diatur sedemikian rupa dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang tidak hanya stabil, efektif, dan efisien, namun juga mengakomodasi kondisi spektrum pluralitas politik yang ada di Indonesia.

Ketiga, Pemikiran tentang Negara Islam dan *Khilafah*. Pembahasan mengenai negara Islam dan *khilafah* merupakan perkara yang menarik ketika mengkaji sebuah gerakan Islam. Sudah menjadi hal umum bahwa setiap gerakan Islam selalu memiliki pandangan tersendiri terhadap kedua konsep tersebut. Tak

jarang diantara sesama gerakan Islam tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang penting atau tidaknya eksistensi sebuah negara Islam dan *khilafah* (Ash-Shalabi, 2011).

Kalaupun ada gerakan-gerakan Islam yang menyatakan pentingnya eksistensi kedua konsep tersebut, hampir bisa dipastikan bahwa diantara gerakan Islam itu akan berbeda dalam *manhaj*, atau metode, untuk mewujudkannya. Begitulah, konsep negara Islam dan *khilafah* selalu menjadi polemik bagi kaum Muslimin saat ini. Terutama, setelah runtuhnya *khilafah* Turki Utsmani pada tahun 1924, kaum Muslimin semakin dibingungkan dengan perdebatan mengenai penting atau tidaknya eksistensi negara Islam dan *khilafah* (Ash-Shalabi, 2011).

Hasan al-Banna mendefinisikan “negara Islam” sebagai negara yang merdeka, yang tegak diatas *syariat* Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsip yang lurus, dan menyampaikan dakwahnya ke segenap umat manusia (dalam Furkon, 2004:65). Islam yang hanif ini mengharuskan pemerintahan tegak diatas kaidah sistem sosial yang telah digariskan oleh Allah untuk umat manusia. Ia tidak menghendaki terjadinya kekacauan dan tidak membiarkan umat Islam hidup tanpa pemimpin (al-Banna, 2012b:297).

Menurut Hasan al-Banna, salah satu tugas negara Islam adalah untuk menjaga keimanan. Sebab menyebarkan Islam dengan ber-*khutbah* saja tidak cukup, tetapi mesti dibantu oleh kekuatan negara. Jika negara tidak menjaga Islam, maka dikhawatirkan kekuasaannya akan jatuh (dalam Furkon, 2004:66). Dalam hal ini, Hasan al-Banna mengutip ucapan teolog Muslim terkenal, Muhammad al-Ghazali, yang menyatakan bahwa *syariah* adalah pondasi, dan pemerintah adalah bentengnya. Jika pemerintah tanpa pondasi akan mudah runtuh menjadi berkeping-keping, dan jika *syariah* tanpa benteng akan hilang dan hancur (al-Banna, 2012b).

Bagi Hasan al-Banna, *daulah Islamiyah* atau negara Islam tidak akan tegak kecuali di atas

pondasi *dakwah*, sehingga ia menjadi sebuah pemerintahan yang mengusung suatu misi, bukan sekedar bagan struktur; dan bukan pula pemerintahan yang materialistis, yang gersang tanpa ruh di dalamnya. Demikian pula *dakwah*, tidak mungkin tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan, yang akan menjaga, menyebarkan, dan mengokohkannya dari negara (al-Banna, 2012b:298).

Hasan al-Banna menyatakan bahwa selama Islam belum tegak, maka seluruh kaum Muslimin berdosa. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*) karena pengabaian mereka untuk menegakkannya dan keengganan mereka untuk mewujudkannya. Karena tugas negara Islam, menurut Hasan al-Banna, diisyaratkan untuk memainkan peranan aktif dan positif dalam menyebarkan Islam dan merealisasikan ide-ide Islam (dalam Furkon, 2004:66). Dengan kata lain, negara Islam menjadi agen untuk mempromosikan Islam.

Dalam buku-buku *fiqh*, masalah hukum dan pemerintahan termasuk dalam bidang kajian yang pokok, bukannya masalah cabang. Islam adalah hukum sekaligus penerapannya, sebagaimana ia adalah *syariat* dan pengajaran, serta undang-undang dan peradilan, yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain (Mahmud, 2011:119).

Pemikiran Hasan al-Banna tersebut telah membawa *Ikhwanul Muslimin* di Mesir menjadi gerakan Islam yang mengusung pembentukan sebuah negara Islam. *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, tahun 1928-1949, menghendaki kebangkitan umat yang ideal, yang tunduk pada Islam, hingga Islam menjadi petunjuk dan pemimpin, yaitu umat yang dikenal di tengah-tengah manusia sebagai *daulah* (negara) yang berpedoman kepada *Al-Qur'an*, yang ter-*shibghah* olehnya, membelanya, menyeru kepadanya, berjuang pada jalannya, dan berkorban pada jalannya dengan jiwa dan harta (al-Banna, 2012b).

Ikhwanul Muslimin di Mesir juga berjuang untuk membentuk dan menghidupkan kembali negara Islam, agar di tengah

masyarakat tegak berdiri pemerintahan Muslim yang didukung oleh umat Muslim, dan yang mengatur seluruh aspek kehidupannya dengan *syariat* Islam, yang telah diperintahkan oleh Allah (Syamakh, 2011:19).

Adapun cara yang dipakai untuk mewujudkan sebuah negara Islam, maka cara yang dipakai adalah cara-cara yang konstitusional. Dengan demikian, melalui PEMILU (Pemilihan Umum) yang independen, jujur, dan adil diharapkan anggota-anggota *Ikhwanul Muslimin* di Mesir akan masuk ke lembaga legislatif dan eksekutif untuk kemudian menegakan Islam melalui kekuatan lembaga-lembaga tersebut (Furkon, 2004:69). Sementara dari luar pemerintahan, *Ikhwanul Muslimin* di Mesir mempersiapkan masyarakat Muslim yang ideal, dengan sistem *tarbiyah* yang dimilikinya serta senantiasa menasehati pemerintah supaya melakukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan *syariat* Islam (Furkon, 2004:70).

Sementara itu, dalam memandang masalah *khilafah*, *Ikhwanul Muslimin* di Mesir berkeyakinan bahwa *khilafah* adalah lambang kesatuan Islam dan bentuk formal dari dari ikatan antar bangsa Muslim. Ia merupakan identitas Islam, yang mana kaum Muslimin wajib memikirkan dan menaruh perhatian dalam merealisasikannya. *Khilafah* adalah tempat rujukan bagi pemberlakuan hukum Islam. Oleh karena itu, para Sahabat Nabi lebih mendahulukan mengurus masalah ke-*khilafah*-an daripada mengurus jenazah Rasulullah Muhammad SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*), ketika beliau wafat, dan menyelesaikannya dengan mantap (al-Banna, 2012b).

Banyaknya *Hadist* yang menyebutkan tentang kewajiban mengangkat *imam*, penjelasan tentang hukum-hukum *imamah*, dan perincian segala sesuatu yang terkait dengannya adalah bukti nyata bahwa diantara kewajiban kaum Muslimin ialah menaruh perhatian serius untuk memikirkan masalah *khilafah*, sejak *manhaj khilafah* itu digulirkan sampai kemudian terbengkalai seperti sekarang ini (Ash-Shalabi, 2011). Oleh karena itu, *Ikhwanul Muslimin* di

Mesir menjadikan *fikrah* tentang *khilafah* dan upaya mengembalikan eksistensinya sebagai agenda utama dalam *manhaj*-nya (al-Banna, 2012b:258).

Diantara upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara Islam dan Arab adalah meningkatkan kerjasama kebudayaan, sosial, dan ekonomi antar seluruh negara Islam. Setelah itu, membentuk koalisi, membuat perjanjian, mendirikan lembaga-lembaga, dan mengadakan konferensi antar bangsa. Setelah itu pula, membentuk persekutuan bangsa-bangsa Muslim; dan jika hal itu bisa diwujudkan akan dihasilkan sebuah kesepakatan untuk mengangkat *imam* yang satu, yang merupakan penengah, pemersatu, dan penentram hati (Furkon, 2004:76). *Imam* itulah yang disebut *khalifah*, pemimpin *khilafah* Islamiyah (al-Banna, 2012b).

Berbeda dengan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, tahun 1928-1949, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia, tahun 1998-2009, mengalami perubahan besar dalam memandang negara Islam dan *khilafah*. Pembentukan ideologi kader-kader PKS di Indonesia dimulai ketika mereka masih dalam masa-masa Gerakan *Tarbiyah*. Pada masa ini, ideologi Islam sungguh kental terasa dan menjiwai seluruh anggota *jamaah*. Pemikiran ideolog *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb, menjadi rujukan utama bagi pembentukan ideologi Gerakan *Tarbiyah* (Dzakirin, 2011).

Ketika Gerakan *Tarbiyah* berubah menjadi PK (Partai Keadilan) pada tahun 1998, dan melebur kedalam PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pada tahun 2003, partai baru ini mengalami tantangan besar, sebagaimana yang dikemukakan oleh A. Bubalo, G. Fealy & W. Mason (2012), sebagai berikut:

Dalam fase “politik” inilah perkembangan *Tarbiyah*-PKS mengalami tantangan besar. Isu utama perdebatan ini ialah antara kemurnian ideologi dan kepentingan politik. Dalam istilah yang lebih luas, para ideolog berpendapat bahwa PKS harus memegang unsur terpusat ajaran *Ikhwan*, sebab hal ini menyediakan petunjuk

bagi perjuangannya untuk menciptakan tipe baru masyarakat di Indonesia. Berkompromi dengan ajaran ini bisa membahayakan misi utama *Tarbiyah* dan PKS sejak mereka didirikan.

Bagi kelompok pragmatis, PKS hidup bernyawa untuk membawa perubahan pada masyarakat Indonesia, dan ini hanya bisa dilakukan jika PKS memiliki kekuatan. Untuk mempunyai kekuatan sejati, PKS perlu menjadi salah satu diantara dua atau tiga partai besar, dan ini tidak dapat diraih tanpa memperoleh dukungan dari arus utama politik. Kekakuan ideologis akan menghalangi harapan partai menjangkau pemilih-pemilih setianya. Kadangkala, kecenderungan yang berseberangan justru terkemuka dalam komentar-komentar pejabat senior PKS yang mendukung pragmatis (Bubalo, Fealy & Mason, 2012:58-59).

Saat ini, didalam tubuh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) terdapat dua kubu besar yang berbeda pandangan tentang cara membesarkan partai. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Burhanuddin Muhtadi (2012), yang menyatakan bahwa:

Ketika dideklarasikan sebagai partai, struktur *harakah* (gerakan) dikawinkan dengan partai, sehingga muncul adagium “*al-harakah hiya al-hizb, wa al-hizb huwa al-harakah*” (gerakan adalah partai dan partai adalah gerakan). Karena *mindset*, genealogi, dan pengalaman historisnya berbeda, maka orientasi *harakah* yang idealis-ideologis dan konservatif sering berbeda dengan kubu *hizb* yang lebih pragmatis-realistis, tapi sangat rasional dan fleksibel.

Kubu *hizb* lebih lihai dalam membesarkan partai dan memahami definisi politik sebagai arena perebutan kekuasaan. Sebaliknya, kubu *harakah* kurang fleksibel dalam melakukan kompromi dan negosiasi. Pada awalnya, kubu *harakah* dominan di PK. Kubu *hizb* mendapatkan momentum ketika PK hanya mendulang suara 1.4 juta pada Pemilu 1999. Kubu *harakah* dianggap terlalu hitam-putih dalam mengelola partai sehingga kurang berhasil (Muhtadi, 2012:220-221).

Tokoh-tokoh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang terdapat dalam kubu *harakah*, diantaranya adalah ideolog PKS, Abu Ridho, Untung Wahono, dan Mutamimmul Ula. Sementara tokoh-tokoh PKS dalam kubu *hizb*, diantaranya adalah Hilmi Aminuddin, Anis

Matta, dan Fahri Hamzah (Muhtadi, 2012).

Ketika masih bernama PK (Partai Keadilan), nuansa ideologis sangat kental terasa di tubuh partai. Hal ini karena PK didominasi oleh kubu *harakah*. Dalam manifesto pendirian PK, ada seruan untuk merestorasi ke-*khalifah*-an Islam. PK menggariskan medan dakwah *khilafah*, yakni setelah pemerintahan Islam (negara Islam) di Indonesia terbentuk diharapkan partai-partai Islamis yang berafiliasi dengan *Ikhwanul Muslimin* di negara-negara lain juga berhasil membentuk sistem pemerintahan Islam (Muhtadi, 2012).

Kemudian, mereka membentuk lembaga multilateral yang beranggotakan negara-negara Islam yang bersepakat membentuk pemerintahan Islam sedunia atau *khilafah Islamiyah*. Dalam Musyawarah Nasional PK tahun 2000, sempat tercetus gagasan ke-*khalifah*-an Islam sebagai cita-cita jangka panjang PK, pada saat membahas panduan kebijakan dasar partai, yang dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:

[Kami] menyadari bahwa tujuan *dakwah* yang akan dilakukan adalah tujuan yang sangat besar, yaitu menerapkan agama Allah di bumi dan mengukuhkan kedaulatan atau negara Islam dalam sebuah sistem ke-*khalifah*-an Islam, yang hasilnya dapat dirasakan oleh generasi-generasi berikut. Oleh karena itu, setiap kebijakan [...] dan program [...] berkaitan dengan tiga dimensi waktu. Masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan (dalam Muhtadi, 2012:194-195).

Jika diperhatikan, pandangan PK (Partai Keadilan) di Indonesia tentang negara Islam dan *khilafah* memiliki kesamaan dengan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, tahun 1928-1949. Keduanya sama-sama menganggap penting eksistensi *daulah Islam* dan *khilafah Islamiyah*. Maka dari itu, mereka sama-sama memperjuangkan tegaknya kembali sebuah negara Islam dan menyatukan seluruh kaum Muslimin di dunia dalam sebuah ke-*khalifah*-an Islam.

Tetapi, pandangan partai ini terhadap negara Islam dan *khilafah* berubah seiring

dengan berubahnya nama PK (Partai Keadilan) menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Sebagaimana diketahui bahwa PKS didominasi oleh kubu *bizb*, yang lebih pragmatis. Setelah bertransformasi menjadi PKS, ajakan untuk mengembalikan ke-*khalifah*-an Islam tidak lagi termaktub dalam cita-cita politik dan *platform* partai. Ini sesuai dengan perubahan strategi PKS di Indonesia, yang ingin meluaskan ceruk pasar pemilih dengan memprioritaskan agenda-agenda yang bisa diterima publik secara luas. Namun demikian, gagasan *khilafah* Islam masih tertanam kuat dalam pemikiran kader dan elite PKS di Indonesia (Muhtadi, 2012:195).

Gagasan negara Islam dan *khilafah*, dalam pandangan PKS di Indonesia yang muncul saat ini ke permukaan, sangat berbeda dengan gagasan sebelumnya ketika masih bernama PK (Partai Keadilan). PKS di Indonesia telah mengubah pemikiran sebelumnya, dari memperjuangkan tegaknya *syariat* Islam sebagai dasar negara, atau memperjuangkan tegaknya negara Islam, menjadi memperjuangkan tegaknya nilai-nilai universal Islam didalam negara. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh MPP (Majelis Pertimbangan Partai) PKS di Indonesia, sebagai berikut:

Secara subjektif, setiap Muslim berkeinginan agar *syariat* Islam diterapkan oleh negara. Namun, keinginan subjektif tersebut agar dapat dimenangkan di wilayah publik harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti: kesesuaian dengan konteks dari segi ruang dan waktu; mempunyai hubungan rasional-organik; memenuhi *rule of the game*; memenuhi prinsip pluralitas dan kehidupan bersama (non-diskriminatif); dan resolusi konflik, agar konsep atau ide tadi memenuhi prinsip “keadilan publik”.

Kebajikan universal Islam yang mampu menembus dimensi zaman, teritorial, generasi, dimensi kehidupan, serta rahmat bagi semesta alam akan menjadi ide atau konsep yang mudah diterima publik. Dalam titik ini, maka persoalannya bukan terletak pada debat mengenai siapa yang memerintah atau apa bentuk negara, tetapi pada soal bagaimana

menegakan nilai-nilai universal Islam di negeri Muslim terbesar ini.

Dengan demikian, ide *amar ma'ruf nahi munkar* secara objektif dapat dirumuskan bukan sekedar upaya untuk memberantas judi, miras [minuman keras], prostitusi, dan mengajak ke masjid, *infaq*, *shadaqah*, puasa, haji, dan sebagainya, tetapi juga upaya memberantas korupsi dan mafia peradilan, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, membela nasib buruh, tani dan nelayan, menegakkan HAM [Hak Azasi Manusia], demokratisasi, pembangunan ekonomi umat, mengurangi diskriminasi di hadapan hukum, melestarikan lingkungan hidup, membangun IPTEK [Ilmu Pengetahuan dan Teknologi], dan seterusnya.

Bila gerakan ini digelorkan, maka sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah kita membangkitkan energi dan ruh umat untuk menyelesaikan masalah kita sendiri (MPP, 2008:74-75).

Menurut Hidayat Nurwahid, sebagai salah seorang tokoh penting PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia, kata-kata “negara Islam” bukan sesuatu hal yang diutamakan. Pada masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW (*Salallahu 'Alaihi Wassalam*), atau *Khulafa al-Rasyidun*, *Khulafa* Umayyah, dan Abbasiyah juga tidak menyebutkan “negara Islam”. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu hadir dalam kaidah kehidupan dan kemudian publik mengarahkan potensinya untuk tidak melakukan kezaliman pada apapun dan siapapun, serta tidak menghabiskan waktu dengan perdebatan yang tidak berujung pangkal (dalam Furkon, 2004:234).

Hidayat Nurwahid juga mengemukakan bahwa dalam kehidupan, baik wilayah agama maupun negara, harus dilandasi oleh moral agama dan dilakukan secara konsisten yang berlandaskan ajaran Islam, yaitu *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* (dalam Rohim, 2009:111). Dalam pandangan Hidayat Nurwahid, dalam konteks Indonesia, *syariat* Islam sudah terlalu sering disalahpahami. Maka yang paling diutamakan dari *syariat* Islam sekarang ini adalah bagaimana tampil menjadi solusi yang indah, dinikmati, sesuatu yang bisa dilaksanakan, dan

itu coba dilakukan secara riil politik. Lebih dari itu, dalam pelaksanaan *syariat* Islam harus membawa kepada keyakinan publik bahwa *syariat* Islam tidak menjadi faktor diskriminasi dan desintegrasi, tapi menjadi faktor yang membawa kerahmatan, faktor solusi dari *syariat* Islam itu sendiri (dalam Furkon, 2004:236).

Selain Hidayat Nurwahid, Anis Matta sebagai salah satu elite PKS di Indonesia juga memiliki pendapat yang serupa. Anis Matta, antara lain, mengemukakan bahwa:

[...] tidaklah penting menangkap wacana negara Islam atau bukan negara Islam, karena negara ini milik umat Islam. Sejak awal, kita mengidentifikasi diri kalau kita bukan orang luar di negeri ini, tapi bagian dari negeri ini. Dulu, orang mengelola negara ini dengan cara sekular, sekarang kita ingin mengelola negara ini dengan cara Islam, itu intinya. Yang perlu kita bangun adalah bagaimana menghadirkan Islam pada seluruh sektor kehidupan.

Kita sekarang ini membangun suatu pandangan *fiqh* bernegara yang jauh lebih luas, tidak berorientasi tekstual. Kita menempuh cara-cara politik seperti ini dengan semangat yang lebih substansial. Misalnya, bagaimana mengelola sistem pendidikan Islam dengan cara Islam, bagaimana mengelola sistem pertahanan kita secara Islami, itu yang penting. Dan tidak semuanya itu menyangkut wacana dan pemikiran, justru sebagian besar di tingkat aplikasi.

Jadi, jauh sebelum kita menggunakan nama *syariat* Islam, Republik Islam, dan seterusnya, buktikan saja dulu di tingkat kenyataan, kita memang kapabel, bahwa orang *enjoy* kalau kita berkuasa. Ini jauh lebih penting daripada ketika kita menggunakan nama “Islam”, kemudian negara ini bangkrut di tangan kita. Kalau kita diserang Amerika dan tidak bisa melawan, atau dikerjai George Soros dan kita diam, itu tidak ada gunanya.

Dengan kata lain, dari sudut kelembagaan, mau disebut “negara Islam” atau “komunitas Islam yang bernegara”, intinya bukan wadahnya, tapi *amaliah*-nya dan arah visi dan misinya (dalam Furkon, 2004:236).

Demikian halnya dengan pandangan tentang *khilafah* Islamiyah. Dalam pandangan elite PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di

Indonesia, *khilafah* adalah konsep tentang satu kekuasaan yang menyatu bagi seluruh wilayah-wilayah Islam dalam suatu kekuasaan yang tertinggi dalam suatu kendali. Tetapi, bagaimana pengendalian itu dilakukan secara bersama-sama, itu terpulang kepada formatnya yang disesuaikan dengan situasi-situasi pada zaman setiap generasi (Furkon, 2004:248).

Hidayat Nurwahid juga memandang bahwa ke-*khalifah*-an adalah sebuah aktivitas politik, dimana nilai-nilai Islam hadir dan peran dari politik Islam memberdayakan umat itu berhasil, dimana yang *munkar* bisa diminimalisasi dan yang *ma'ruf* bisa dimaksimalisasi. Pada zaman ini, tanya Hidayat Nurwahid, apakah ke-*khalifah*-an harus berwujud dengan nama *khilafah*, bukankah negara “republik” atau “kerajaan”, misalnya, dalam skala tertentu bisa disebut *khilafah*? (dalam Furkon, 2004:249).

Menurut Hidayat Nurwahid, apapun namanya, *republik* atau *kerajaan*, kalau disitu terlaksana dengan baik nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, ke-Islam-an, pemberdayaan, tidak terjadi praktek-praktek korupsi, penindasan, kezaliman, nepotisme, tirani, dan kemudian terjadi pergantian kepemimpinan yang Islami, maka ianya bisa disebut sebagai ke-*khalifah*-an itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, yang sudah berbentuk “republik”, tidak perlu lagi diubah namanya menjadi ke-*khalifah*-an Islam (dalam Furkon, 2004:250).

Ahmad Dzakirin, salah seorang kader PKS di Indonesia, juga mengemukakan hal yang senada dengan Hidayat Nurwahid. Menurutnya, kepemimpinan dalam perspektif *khilafah* lebih merefleksikan pemahaman terhadap nilai dan prinsip kepemimpinan yang benar menurut Islam, ketimbang sebagai sebuah eksistensi maupun bentuk pemerintahan. *Khilafah* lebih merupakan substansi nilai yang bersifat tetap, ketimbang perincian-perincian institusional yang bersifat dinamis (Dzakirin, 2011:34).

PKS di Indonesia lebih melihat fungsi dari ke-*khalifah*-an itu sendiri. Jika sebuah negeri mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dan

berwibawa untuk membantu dan melindungi negeri Muslim lainnya, maka negara tersebut sudah memerankan dirinya sebagai ke-*khalifah*-an, meskipun bentuk dan namanya “republik” atau “kerajaan”. Alasannya, bentuk sosio-kultural dan geo-politik pada zaman modern ini sudah berbeda dengan masa lalu. Lebih jauh lagi, bagi PKS di Indonesia, konsep ke-*khalifah*-an perlu direkonstruksi dengan mempertimbangkan perubahan tatanan dunia yang sangat dinamis ini (Furkon, 2004:253).

Tetapi disisi lain, pandangan-pandangan kader PKS tersebut dikritik oleh ideolog PK (Partai Keadilan), yaitu Abu Ridho. Abu Ridho menyebutkan bahwa ada sebagian koleganya yang terjerat oleh *virus pragmatisme* (dalam Muhtadi, 2012:217). Akhirnya, partai menjadi menyimpang dari tujuan awal didirikannya. Abu Ridho (2008), lebih lanjut, mengungkapkan sebagai berikut:

Apabila ada aktifis dakwah (*da'i*) yang menyatakan bahwa partai dakwah ini tidak akan memperjuangkan *syari'at* Islam, dengan alasan apapun (politis maupun diplomatis), jelas telah menyimpang dan menyeleweng dari sasaran gerakan dakwah yang utama. Mestinya, mereka justru menyebarkan opini tentang kewajiban menegakkan *syari'ah* bagi setiap Muslim, secara massif, bukan malah menyembunyikannya. Apalagi di era Reformasi, yang setiap orang bebas bicara apa saja, karena dilindungi oleh Undang-Undang.

Kemudian, apabila partai dakwah berkoalisi dengan partai, organisasi, atau komunitas lain yang berbasis ideologi asing, juga telah menyimpang. Karena tugas gerakan dakwah Islam adalah membebaskan umat dari penjajahan atau dominasi asing, baik itu ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial. Bukan malah bekerjasama dalam ketidakjelasan maksud dan tujuan.

Para kader dakwah atau *da'i* yang terpengaruh kemudian menganut paham materialisme dan gaya hidup konsumerisme juga telah menyimpang dan menyeleweng dari sasaran gerakan dakwah ini. Mereka seharusnya memberi contoh berupa keteladanan hidup yang diajarkan Rasulullah SAW (*Shalallahu 'Alaihi Wasallam*), sederhana, dan santun dalam keinginan dan kebutuhan.

Kesalahan dan dosa mereka hanya bisa ditebus dengan menyosialisasi kewajiban menegakkan *syari'at* kepada seluruh elemen umat, dan

memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh; serta menghindari diri dari sikap dan perilaku materialistis dan konsumtif (Ridho, 2008).

Akhirnya, jika *Ikhwanul Muslimin* di Mesir memiliki pandangan bahwa menerapkan Islam dalam negara, dengan membentuk sebuah negara Islam dan mempersatukan dunia Islam dengan menegakkan *khilafah* Islamiyah, adalah sebuah kewajiban yang tak bisa ditunda, maka PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia lebih memandang perlunya mengamalkan nilai-nilai universal Islam dan fungsi-fungsi ke-*khilafah*-an dalam sebuah negara, tanpa harus menjadi negara Islam dan *khilafah* Islamiyah dalam wujud yang sebenarnya.

Meskipun demikian, didalam tubuh PKS di Indonesia masih terdapat juga kader-kader partai, terutama kader-kader senior yang berada dalam kubu *harakah*, yang tetap meyakini perlunya eksistensi sebuah negara Islam dan *khilafah* Islamiyah, seperti yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna dari *Ikhwanul Muslimin* di Mesir.

KESIMPULAN ⁶

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Indonesia, 1998-2009, memang banyak dipengaruhi oleh pemikiran *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, 1928-1949. Meskipun demikian, antara *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, 1928-1949, dengan PKS di Indonesia, 1998-2009, sangatlah berbeda; meskipun terdapat juga beberapa kesamaan.

Ikhwanul Muslimin di Mesir, 1928-1949, bersifat ideologis dalam berpolitik. Hal ini bisa kita lihat dalam perkataan serta sikap

Hasan al-Banna, sebagai figur utama *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Memang, Hasan al-Banna memiliki pemikiran yang cenderung moderat, tetapi moderat di sini bukan berarti pragmatis. “Moderat” di sini maksudnya bahwa Hasan al-Banna tidak menyerukan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan dan mencoba membuka diri terhadap nasionalisme serta demokrasi dengan menyaringnya terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam.

Dalam perkembangannya, dari tahun 1928-1949, *Ikhwanul Muslimin* di Mesir terlihat konsisten dengan pemikiran tersebut. Meskipun di Mesir kultur Islam sangat dominan, tetapi kondisi masyarakat Mesir pada saat itu jauh dari nilai-nilai Islam dan lebih dekat dengan nilai-nilai Barat. Oleh karena itu, boleh dikatakan dalam hal ini bahwa *Ikhwanul Muslimin* di Mesir berani tampil “melawan arus”. Hasilnya, *Ikhwanul Muslimin* harus beberapa kali berhadapan dengan pemerintah Mesir. Namun demikian, wataknya yang ideologis dan idealis membuat *Ikhwanul Muslimin* di Mesir banyak dicintai oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Ini terbukti dari semakin banyaknya anggota *Ikhwanul Muslimin* dan meluasnya pengaruh pemikiran *Ikhwanul Muslimin* sampai keluar Mesir, bahkan hingga ke Indonesia.

Sementara itu, PKS di Indonesia mencoba mengemas pemikiran-pemikiran *Ikhwanul Muslimin* di Mesir agar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-kultural. Meskipun penganut Islam di Indonesia adalah mayoritas, tapi masyarakat Indonesia sangat menjaga budaya-budaya warisan leluhurnya. Selain itu, heterogenitas agama juga menjadi salah satu warna dalam masyarakat Indonesia.

Dalam memahami kenyataan seperti ini, PKS di Indonesia mengambil langkah cerdas dalam hal membesarkan partai. PKS di Indonesia terlihat lebih fleksibel dalam mengembangkan faham *Ikhwanul Muslimin* dari Mesir. PKS di Indonesia menyesuaikan pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna dari

⁶Artikel ini merupakan ringkasan Skripsi Sarjana saya, yang dibimbing oleh Andi Suwirta, M.Hum. dan Moch Eryk Kamsori, S.Pd., di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung, pada tahun 2015. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing, dan juga para penguji, yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun dalam penulisan Skripsi Sarjana ini. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam artikel ini tetap menjadi tanggung jawab akademik saya sendiri.

Ikhwanul Muslimin di Mesir tersebut dengan situasi, kondisi, serta budaya di Indonesia. Sikap seperti ini bisa kita lihat dari pernyataan-pernyataan dan pokok-pokok pikiran para elite PKS di Indonesia, seperti Hidayat Nurwahid dan Anis Matta.

Namun disisi lain, hal ini justru sedikit demi sedikit mulai melunturkan watak ideologis partai PKS di Indonesia. Akhirnya, partai menjadi terlihat cenderung bersifat pragmatis dalam berpolitik. Disatu sisi, boleh dikatakan bahwa PKS cerdas dalam merebut hati masyarakat Indonesia secara umum; tetapi disisi lain, PKS di Indonesia justru kehilangan citranya sebagai partai *dakwah* yang berideologikan Islam.⁷

Referensi

- al-Banna, Hasan. (2012a). *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Jilid 1. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, Terjemahan.
- al-Banna, Hasan. (2012b). *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Jilid 2. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, Terjemahan.
- al-Ghazali, Abdul Hamid. (2001). *Meretas Jalan Kebangkitan: Peta Pemikiran Hasan al-Banna*. Solo: Era Adicitra Intermedia, Terjemahan.
- Artikel berjudul "Demokrasi". Tersedia secara online di: <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> [diakses di Bandung, Indonesia: 26 April 2015].
- Artikel berjudul "Pengertian Nasionalisme". Tersedia secara online di: <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-nasionalisme-para-ahli-definisi.html> [diakses di Bandung, Indonesia: 22 April 2015].
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. (2011). *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Terjemahan.
- Berita "Nasionalisme Bagian dari Islam?". Tersedia secara online di: http://nasional.kompas.com/read/2010/06/22/17043684/PKS.Nasionalisme.Bagian.dari.Islam?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news [diakses di Bandung, Indonesia: 25 April 2015].
- Berita "PKS: Inilah Wawasan Nasionalisme dan Kebangsaan Kami". Tersedia secara online di: <http://www.al-intima.com/taujih-hilmi-aminuddin/pks-inilah-wawasan-nasionalisme-dan-kebangsaan-kami> [diakses di Bandung, Indonesia: 20 Mei 2015].
- Bilal. (2012). "Dilema PKS". Tersedia secara online di: <http://www.arrassmah.com/read/2012/04/11/19333-dilema-pks.html#sthash.mhjLMMuU.dpuf> [diakses di Bandung, Indonesia: 27 April 2015].
- Bubalo, A., G. Fealy & W. Mason. (2012). *PKS & Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, Terjemahan.
- Dzakirin, Ahmad. (2011). *Tarbiyah Siyasiah: Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Furkon, Aay Muhammad. (2004). *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Teraju.
- Handayani, Rifko. (2011). "Loyalitas Masyarakat terhadap Pemimpin Menurut Al-Mawardi dan Hasan al-Banna". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Konsentrasi Siyasah Syar'iyah, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah.
- Haya, Siti Kurnia. (2014). "Ideologi Gerakan Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS)". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Studi Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga.
- Ihsan, Muhammad. (2009). "Nasionalisme dalam Pandangan Politik Partai Keadilan Sejahtera". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga.
- Kamseno, Sigit. (2013). "Kenapa Kita Harus Curiga pada PKS?". Tersedia secara online di: <http://www.dakwatuna.com/2013/09/21/39624/kenapa-kita-harus-curiga-pada-pks/> [diakses di Bandung, Indonesia: 27 April 2015].
- Krismono. (2009). "Demokrasi Perspektif Hizb al-Tahrir dan Al-Ikhwani al-Muslimun". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga.
- Machmudi, Yon. (2006). *Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. Bandung: Harakatuna.
- Mahmud, Abdul Halim. (2011). *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Mitchell, Richard Paul. (2005). *Masyarakat al-Ikhwani al-Muslimun*. Surakarta: Era Intemedia.
- MPP [Majelis Pertimbangan Partai]. (2008).

⁷**Pernyataan:** Dengan ini saya menyatakan bahwa artikel ini adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko atau sanksi akademik apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan terhadap keaslian karya saya ini. Artikel ini juga belum direvisi dan belum diterbitkan oleh jurnal ilmiah lain.

- Memperjuangkan Masyarakat Madani*. Jakarta: MPP PKS [Majelis Pertimbangan Partai, Partai Keadilan Sejahtera].
- Muhtadi, Burhanuddin. (2012). *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahmawati, Nia. (2013). "Definisi, Tujuan, dan Fungsi Partai". Tersedia secara online di: <http://obrolanpolitik.blogspot.com/2013/02/definisi-tujuan-dan-fungsi-partai.html> [diakses di Bandung, Indonesia: 26 April 2015].
- Ridho, Abu. (2008). "Penyimpangan-penyimpangan dalam Gerakan Da'wah Islam". Tersedia secara online di: <https://ainspirasi.wordpress.com/tag/abu-ridho/> [diakses di Bandung, Indonesia: 23 Mei 2015].
- Rohim, Muamar. (2009). "Studi Pemikiran Hidayat Nurwahid terhadap Relasi Agama dan Negara". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah UIN [Universitas Islam Negeri] Sunan Kalijaga.
- Syamakh, Amer. (2011). *Al-Ikhwan al-Muslimun: Siapa Kami dan Apa yang Kami Inginkan*. Solo: Era Adicitra Intermedia, Terjemahan.